

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014**

Oleh
NOVA NURHANIVA
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasi, Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/Verivikation (Verifikasi Data). Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusak adalah belum melakukan inventarisasi kebutuhan buku teks pelajaran siswa dari mulai buku kelas I sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinyal di lokasi sekolah, dan jauhnya jaringan kabel telkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventarisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas I sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speedy dan upaya untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang tepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplayer cat yang lebih kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat dimana proses pendidikan secara formal dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Pada proses selanjutnya sekolah adalah tempat yang bukan hanya

sekedar tempat berkumpul antara guru dan murid saja, melainkan berada pada satu tatanan yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. Kegiatan lain organisasi sekolah

MODERAT

Modern dan Demokratis

adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi demi terlaksananya pembangunan bangsa.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana diharapkan. Anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang belum pernah sekolah sekitar 693,7 ribu orang (1,7%). Sementara itu yang tidak bersekolah lagi baik karena putus sekolah maupun karena tidak melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah sekitar 2,7 juta orang atau 6.7 persen dari total penduduk usia 7-15 tahun.

Pemerintah melakukan perubahan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2009, antara lain mencakup penggunaan dana, biaya satuan BOS yang mengalami peningkatan sekitar 50 persen, serta tuntutan peningkatan transparansi akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lebih lanjut dikatakan Mendiknas, BOS 2009 mengalami kenaikan signifikan sekitar 50 persen bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biaya satuan BOS, termasuk BOS buku di dalamnya per siswa per tahun mulai Januari 2009 untuk tingkat SD di kota menjadi Rp 400 ribu dan Rp 397 ribu untuk siswa SD di tingkat kabupaten. Sedangkan BOS SMP di kota Rp. 575 ribu dan di kabupaten Rp. 570 ribu. BOS tingkat SD disalurkan kepada sekitar 30 juta siswa dan BOS SMP kepada sekitar 11,8 juta siswa. "Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar.

Penerimaan dana dari program BOS merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah tersebut untuk memudahkan siswa dalam pembiayaan pendidikannya. Artinya dengan diterimanya dana tersebut maka diharapkan parasiswa akan lebih dapat berkonsentrasi dalam belajar sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dimana nantinya dengan adanya peningkatan hasil belajar akan lebih meningkatkan mutu lulusan dari sekolah tersebut. Namun fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa implementasi manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bahwa pihak sekolah kurang maksimal dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014 bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan mencrapkan MBS sebagai berikut : sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; (Permendikbud 2013 : 9).

Adapun penggunaan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014 Bab V tentang Penggunaan Dana Bos, sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan

Pengaruh Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda
Terhadap Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
LUCKY TEGUH PRABOWO

2.	<u>Pendirian pasar modern memperhatikan perkembangan permukiman baru</u> Memperhatikan jumlah penduduk Memperhatikan kepadatan penduduk	3	114	226
		4	112	
3.	<u>Pelaku usaha pasar modern adalah orang yang berdomisili dekat dengan pasar</u> Pelaku usaha Pasar Modern melakukan kemitraan atau kerjasama di bidang perdagangan dengan Pasar Tradisional Pelaku usaha pasar modern dapat dengan mudah mendatangi lokasi	5	102	238
		6	136	
4.	<u>Pendirian Pasar Modern Harus memperhatikan keberadaan pasar tradisional</u> Memberikan perlindungan pada Pasar Tradisional Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional	7	95	225
		8	5130	
Jumlah		8	961	961
Rata-Rata			120,12	120,12

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Dari tabel rekapitulasi hasil jawaban responden untuk variabel pemberian izin pembangunan pasar modern oleh pemda diperoleh total skor sebesar 961.

Rata-rata skor variabel pemberian izin pembangunan pasar modern oleh pemda

$$= \frac{\text{Total skor}}{\text{Jumlah item}}$$

$$= \frac{961}{8}$$

$$= 120,12$$

Dengan demikian rata-rata untuk variabel pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda Ciamis sebesar 120,12 yang berarti berada pada kategori kurang. Apabila ditunjukkan dalam bentuk persentase diperoleh

angka sebesar 52,68 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase variabel pemberian izin pembangunan pasar modern oleh pemda.

$$(X) = \frac{\text{Total skor} \times 100\%}{\text{Skor ideal}}$$

$$= \frac{961 \times 100\%}{3 \times 76 \times 8}$$

$$= \frac{961 \times 100\%}{1824}$$

$$= 52,68\%$$

Hasil perhitungan tersebut apabila dikonsultasikan dengan hasil persentase menurut Arikunto (1998: 246) berada pada kategori cukup. Dengan demikian Pemberian Izin Pendirian Pasar Modern Oleh Pemda pada kategori cukup.

Penjualan Pedagang Pasar Tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

**REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN UNTUK VARIABEL PENJUALAN PEDAGANG
DI PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI CIJEUJING
KABUPATEN CIAMIS**

No.	Kualitas Pelayanan	No Item Pertanyaan	Skor	Jumlah Skor
1	2	3	4	5
1	<u>Usaha yang Terpadu</u> Adanya strategi dan konsep penjualan pada pedagang pasar tradisional Adanya penyesuaian rencana oleh pedagang pasar tradisional dengan kondisi yang ada	1	170	316
		2	146	

2. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu peserta didik miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. (Permendikbud 2013 : 27)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di SD Negeri 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada tahun 2014, di temukan beberapa permasalahan-permasalahan menyangkut pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), diantaranya : 1) Masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasi seperti belum adanya akses informasi, tidak terpeliharanya peralatan perpustakaan, tidak adanya penambahan buku dan peralatan perpustakaan lainnya. 2) Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk perawatan dan pembelian komputer. Selama ini yang digunakan sekolah masih menggunakan komputer milik pribadi. 3) Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS, terlihat kondisi sekolah masih kumuh, tembok dinding sekolah banyak yang terkelupas, cat temboknya terlihat kusam dan kotor banyak genteng yang pecah sehingga ketika hujan terjadi kebocoran

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan selama 9 (sembilan) bulan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari responden yang berupa data hasil wawancara serta hasil observasi peneliti yang berupa data fisik tentang implementasi kebijakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi-dokumentasi hasil-hasil laporan pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014.

Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing/Verivikation* (Verifikasi Data)

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Implementasi

wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Menurut Sunggono (1994 : 158), unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasioanal Sekolah adalah suatu dana yang diberikan pemerintah sebagai subsidi dalam bidang pendidikan yaitu tingkat pendidikan dasar yang diberikan kepada setiap warga negara untuk dibebaskan dari

beban biaya operasioanal sekolah. Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam Buku Panduan BOS (2006: 8) menyebutkan bahwa : "BOS adalah komponen untuk biaya operasional non personil bagi sekolah". Lahirnya program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah

Untuk mengatasi dampak dari krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, banyak hal kebijakan publik yang harus dipecahkan, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di bidang pendidikan, dengan jalan memberikan beasiswa bagi anak didik dari keluarga miskin dan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Pertama Menengah Pertama Luar Biasa baik negeri maupun swasta, Pesantren Salafiyah, dan Sekolah keagamaan non Islam yang setara SD dan SMP.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014 Pasal 2, bahwa petunjuk teknis BOS 2014 disusun dengan tujuan :

- a. Penggunaan dan BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun (sembilan) tahun secara efektif dan efisien
- b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

PEMBAHASAN**Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014**

Berdasarkan analisis hasil wawancara tiap-tiap indikator dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat disajikan dalam tabel hasil rekapitulasi berikut ini:

TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan informan	
1. Penggunaan dan BOS tepat sasaran	a. Adanya pengadaan buku pegangan guru	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 9 menyatakan sudah dapat merealisasikan anggaran BOS untuk buku pegangan guru	informan no. 8, 10 dan 11 menyatakan belum dapat direalisasikan
	b. Adanya pengadaan buku teks pelajaran	informan no. 1,2,3,4 dan 5 menyatakan sudah dapat merealisasikan untuk pengadaan buku teks	informan no. 6,7,8,9,10 dan 11 menyatakan masih belum dapat merealisasikan buku teks pelajaran siswa
	c. Adanya pergantian buku yang rusak	Informan no. 1 menyatakan sudah dapat merealisasikan untuk pergantian buku yang rusak	informan no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 dan 11 menyatakan belum dapat melakukan pergantian buku yang rusak
	d. Adanya alokasi anggaran untuk pengadaan ATK	informan no. 1, 2, 3, 4, 6,10 dan 11 menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi anggaran untuk pengadaan ATK	informan no. 5,7,8 dan 9 menyatakan belum dapat merealisasikan alokasi anggaran untuk pengadaan ATK
	e. Adanya alokasi untuk akses informasi <i>online</i> berupa penggunaan internet dengan <i>mobile modem</i>	informan no. 1,2 dan 3 sudah dapat merealisasikan anggaran untuk akses informasi <i>online</i> berupa penggunaan internet dengan <i>mobile modem</i>	informan no. 4,5,6,7,8,9 10 dan 11 menyatakan belum dapat merealisasikan anggaran untuk akses informasi <i>online</i> berupa penggunaan internet dengan <i>mobile modem</i>
	f. Adanya alokasi untuk pemeliharaan perabot sekolah	informan no.1,2 dan 3 menyatakan sekolah sudah dapat merealisasikan anggaran BOS untuk untuk pemeliharaan perabot sekolah	informan no. 4, 5,6, 7, 8,9,10 dan 11 menyatakan untuk pemeliharaan perabot sekolah belum dapat merealisasikan
	g. Adanya alokasi untuk kegiatan pembelajaran	informan no. 1 dan 2 menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi untuk kegiatan pembelajaran	informan no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 dan 11 menyatakan belum dapat merealisasikan alokasi untuk kegiatan pembelajaran
	h. Adanya alokasi untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik	informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 10 menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik	informan no. 4, 9 dan 11 menyatakan masih belum dapat merealisasikan alokasi untuk kegiatan ekstrakurikuler peserta didik

Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

NOVA NURHANIVA

	i. Adanya alokasi untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler	informan no. 1,2,3 dan 4 menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler	informan no. 5, 6, 7, 8, 9,10 dan 11 masih belum dapat merealisasikan alokasi untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler
	j. Adanya alokasi untuk perbaikan kamar mandi dan WC guru dan peserta didik	informan no. 1,2 menyatakan selama ini sudah dapat melakukan perbaikan kamar mandi dan WC guru dan peserta didik	informan no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 menyatakan sekolah masih kurang dapat merealisasikan anggaran BOS untuk perbaikan kamar mandi dan WC guru dan peserta didik
	k. Adanya alokasi untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah	Tidak terdapat informan yang menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah	Seluruh informan menyatakan sekolah masih belum dapat merealisasikan alokasi untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah
	l. Adanya alokasi untuk pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner	Tidak ada informan yang menyatakan sudah dapat merealisasikan	seluruh informan menyatakan bahwa sekolah selama ini belum dapat merealisasikan untuk pengadaan alat cetak dan pemindai
	m. Adanya alokasi untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik jika penggunaan seluruh komponen telah terpenuhi	informan no. 1 dan 2 menyatakan sudah dapat merealisasikan alokasi untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik jika penggunaan seluruh komponen telah terpenuhi	informan no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 menyatakan masih belum dapat merealisasikan alokasi untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik jika penggunaan seluruh komponen telah terpenuhi
2. Pertanggungja waban keuangan dana BOS	a. Adanya pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 menyatakan sudah dapat melakukan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah	informan no.10 menyatakan masih kurang optimal dalam melakukan pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
	b. Adanya Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak	informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan 10 menyatakan sudah terdapat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak	informan no. 8,9 dan 11 menyatakan masih kurang optimal dalam pembuatan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak
	c. Adanya laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama	informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 11 menyatakan sudah dapat membuat laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama	informan no. 8 dan 10 menyatakan masih kurang optimal dalam membuat laporan realisasi penggunaan dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama

	d. Adanya laporan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS	Seluruh informan menyatakan bahwa sudah dapat membuat laporan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS	Tidak ada informan yang menyatakan masih belum dapat membuat laporan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS
	e. Adanya pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya	informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 8 dan 10 menyatakan sudah melakukan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya	informan no. 4,7,9 dan 11 menyatakan masih kurang optimal dalam melakukan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 secara umum sudah dapat direalisasikan, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dalam petunjuk teknis BOS 2014 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Berdasarkan tabel rekapitulasi dapat diketahui bahwa terdapat hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan

Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, diantaranya :

1. Belum optimalnya realisasi pengadaan buku pegangan guru dari dana BOS
2. Belum optimalnya sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran
3. Belum dilakukannya pergantian buku yang rusak.
4. Masih kurangnya realisasi untuk pengadaan ATK
5. Belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem
6. Belum optimalnya realisasi untuk kegiatan pembelajaran
7. Masih belum direalisasinya alokasi untuk pemeliharaan perabotan sekolah
8. Sekolah belum merealisasikan kegiatan ekstrakurikuler siswa
9. Sekolah masih belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebel
10. Belum adanya realisasi untuk perbaikan kamar mandi dan WC guru dan peserta didik.
11. Sekolah belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah
12. Sekolah belum melakukan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner
13. Belum optimalnya sekolah dalam merealisasikan untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik.
14. Belum optimalnya sekolah dalam pembuatan RAKS
15. Belum optimal sekolah dalam membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak

16. Kurang optimal dalam membuat laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama
17. Belum optimalnya sekolah dalam membuat laporan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS
18. Belum optimalnya pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai upaya mengatasi hambatan-hambatan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk merealisasikan pengadaan buku pegangan guru dengan mendaftarkan kebutuhan buku pegangan guru dari mulai kelas I sampai kelas VI dengan bertanya langsung pada guru kelas.
2. Dilakukan upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventarisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas I sampai kelas VI
3. Upaya mengganti buku yang telah rusak dengan mendaftarkan dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan dan berapa yang dibutuhkan
4. Upaya merealisasikan pengadaan ATK dengan melakukan pengecekan, pendataan dan inventarisasi seluruh ATK yang ada dan menentukan ATK yang dibutuhkan
5. Upaya untuk dapat mengakses informasi dengan menggunakan internet dengan mobil modem berupa pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speedy.
6. Upaya merealisasikan untuk kegiatan pembelajaran dengan melakukan pengadaan berbagai alat dan media pembelajaran yang dibutuhkan yang sebelumnya dilakukan pendataan ulang.
7. Upaya untuk merealisasikan dana BOS untuk pemeliharaan perabotan sekolah berupamelakukan pendataan ulang dan inventarisasi seluruh perabotan sekolah.
8. Upaya dalam mengalokasikan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa berupa melakukan penjadwalan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan inventarisasi terhadap fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler
9. Dilakukan upaya untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang tepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplayer cat yang lebih kompetitif, menyediakan kebutuhan yang diperlukan, mencari tenaga kerja serta mencari pemasok yang menawarkan harga kebutuhan yang lebih rendah
10. Dilakukan upaya untuk dapat merealisasikan anggaran perbaikan WC siswa dengan mengganti dan membangun secara total dengan meminta kepada orang tua siswa untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunannya.
11. Upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah berupa upaya mencari pemasok komputer yang dapat memenuhi keinginan sekolah dalam menyediakan perangkat komputer yang berkualitas dan harganya relatif murah.
12. Upaya untuk pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner dengan terlebih dahulu melakukan pembelian komputer
13. Upaya dalam merealisasikan untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik berupa upaya agar seluruh pos-pos penggunaan dana BOS dapat direalisasikan sekolah sehingga untuk alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik dapat terpenuhi.
14. Upaya dalam pembuatan RAKS sekolah melakukan musyawarah dengan mengundang serta melibatkan komite dan orang tua siswa

15. Upaya sekolah dalam membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak berupa mencari format administrasi tersebut yang mudah dipahami dan dimengerti
16. Upaya sekolah dalam membuat laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama, berupa melakukan pencatatan setiap pengeluaran anggaran baik jumlah uangnya maupun jenis barangnya sehingga diketahui jumlah anggaran yang sudah terserap dari anggaran yang telah direncanakan
17. Upaya sekolah dalam membuat laporan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dengan melakukan pencatatan setiap penggunaan dana kemudian disesuaikan dengan item alokasi penggunaan dana sesuai buku petunjuk.
18. Upaya sekolah dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya dilakukan dengan bukti-bukti transaksi seperti nota, kuitansi dan materai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Selama ini SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran masih belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan tujuan dalam petunjuk teknis BOS 2014 seperti belum optimalnya dalam merealisasikan alokasi pengembangan perpustakaan baik pengadaan buku pegangan guru, buku teks pelajaran siswa, pergantian buku yang

rusak, akses informasi, pengadaan perabotan sekolah, kegiatan pembelajaran termasuk ekstrakurikuler dan perbaikan gedung sekolah seperti pengecatan, penggantian genteng bocor dan mebel sekolah, perbaikan WC guru dan siswa.

2. Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan yang dihadapi pengadaan buku pegangan guru, buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusak berupa belum melakukan inventarisasi kebutuhan buku pegangan guru, buku teks pelajaran siswa dari mulai buku kelas I sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, masih belum optimalnya realisasi pengadaan ATK, kurang direalisasinya alokasi akses informasi, untuk pemeliharaan perabotan sekolah berupa belum adanya pendataan ulang atau inventarisir seluruh perabotan sekolah, masih kurangnya realisasi untuk keperluan kegiatan pembelajaran seperti kurang tersedianya media pembelajaran, sarana dan prasarana lainnya. Di samping itu sekolah masih belum optimal dalam perbaikan gedung sekolah seperti untuk pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebel belum adanya realisasi untuk perbaikan kamar mandi dan WC guru dan peserta didik.
3. Berdasarkan hasil wawancara telah dilakukan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pegangan guru, upaya pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventarisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas I sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, upaya untuk dapat mengakses informasi dengan menggunakan internet dengan mobil modem berupa pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speedy, upaya melakukan untuk kegiatan pembelajaran termasuk kegiatan ekstrakurikuler, upaya untuk merealisasikan dana BOS untuk pemeliharaan perabotan sekolah berupa

melakukan pendataan ulang dan inventarisasi seluruh perabotan sekolah, upaya dalam mengalokasikan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran berupa melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan pada saat pelaksanaan pembelajaran seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran yaitu:

1. Pengelolaan dana BOS SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran diharapkan agar dalam merealisasikan seluruh item penggunaan dana BOS dan lebih terfokus pada penggunaan dana BOS yang belum optimal misalnya alokasi dana BOS untuk pengadaan buku pegangan guru, buku pelajaran siswa, alokasi untuk mengganti buku yang rusak, pengadaan ATK, akses informasi, alokasi untuk keperluan kegiatan pembelajaran termasuk ekstrakurikuler, perbaikan gedung seperti pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebel, perbaikan WC guru dan siswa dan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer beserta printer dan scanner, alat peraga/media pembelajaran, pembelian meja dan kursi peserta didik dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan BOS seperti pembuatan RAKS, buku administrasi, laporan tiap item penggunaan BOS, laporan rekapitulasi dan dokumen pendukung.
2. Diharapkan pengelola dana BOS SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat melaksanakannya dan menggunakannya sesuai buku petunjuk sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi seperti kurangnya pengadaan buku pegangan siswa, buku pelajaran siswa, penggantian buku yang rusak, pengadaan ATK, keperluan kegiatan pembelajaran termasuk ekstrakurikuler, perbaikan gedung sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebel, perbaikan WC guru dan siswa dan pengadaan perangkat komputer berikut printer dan pemindainya serta

laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dapat diminimalisir.

3. Sebaiknya kepala sekolah, guru, pengelola BOS dapat bekerja sama dalam pelaksanaan program BOS untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dengan melakukan berbagai upaya diantaranya upaya inventarisasi macam-macam buku pegangan guru, buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas I sampai kelas VI, baik yang belum ada maupun yang sudah rusak, melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta pengadaan peralatan teknologi berupa perangkat komputer dan alat cetaknya yang dibutuhkan dan upaya-upaya dalam pelaporan pertanggungjawaban sehingga implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Gaffar, Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar
- Mulyasa E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sudiyono. 2007. *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Buku Ajar.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar. Grafika

Wahab, Solichin Abdul. 2009. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendiknas Nomor 63 tahun 2009. Tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*

Permendikbud No. 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos Tahun Anggaran 2014

SK Mendiknas Nomor 44 tahun 2002. tentang Komite Sekolah